

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN (PANWASCAM) PONGGOK**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Oleh:

TRI DINA ERLANI

21107710053



**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BLITAR
2024**



**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
(PANWASCAM) PONGGOK**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**Diajukan kepada
Universitas Islam Balitar Blitar
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Menyusun Karya Ilmiah II (Skripsi)**

Oleh:

TRI DINA ERLANI

21107710053

**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BLITAR
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PKL

Judul

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN (PANWASCAM) PONGGOK

Oleh :

Nama : Tri Dina Erlani

NIM : 21107710053

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 20 Desember 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Fakultas Hukum

Menyetujui,

Pembimbing

M.TAUFAN PERDANA P. S.H.,M.H.
NIDN.0702058404

ABDUL HAKAM S. S.Ag., M.H
NIDN.0701017531

Pembimbing Lapang,

KABIN FERI, S.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Laporan Praktek Kerja Lapangan di Panwascam Ponggok

Nama : TRI DINA ERLANI

NIM : 21107710053

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 8 Januari 2024 Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

DOSEN PEMBIMBING

DOSEN PENGUJI

ABDUL HAKAM S. S.A.g.,M.H.
NIDN.0701017531

MUHAMMAD ZAINUL I. S.H.,M.H.
NIDN.9907147418

Mengetahui,

Mengetahui

Ketua Program Studi Fakultas Hukum

Dekan Fakultas Hukum

M.TAUFAN PERDANA P,S.H.,M.H

WEPPY SUSETIYO,
S.H.,M.H.

NIDN.9907147418

NIDN.0708107902

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI DINA ERLANI

NIM : 21107710053

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan Praktek Kerja Lapangan yang berjudul : **“LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PANWASCAM PONGGOK”**

Yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Laporan ini hasil cuplikan, maka saya bersedia meneriam sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 02 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Tri Dina Erlani

RINGKASAN

Dalam menempuh Pendidikan pada jenjang strata 1 setiap mahasiswa di Universitas Islam Balitar Blitar diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan ketika mahasiswa telah menginjak semester VII yang mana bertujuan agar mahasiswa mengetahui dan mempraktikkan apa yang telah dipelajari tentang bagaimana keadaan dunia kerja yang sebenarnya. Kegiatan ini dilaksanakan mahasiswa atas nama Tri Dina Erlani, Nomor Induk Mahasiswa 21107710053 untuk memenuhi persyaratan kuliah di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar. Aktivitas Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) yang beralamat di Jalan Argo Pegat RT 02 RW 02, Dsn Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Waktu Praktik Kerja Lapangan setiap hari Senin sampai Minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Ponggok, mahasiswa berperan aktif dalam berbagai kegiatan operasional yang mendukung tugas dan fungsi Panwascam sebagai lembaga pengawas Pemilu. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah membantu pengelolaan dokumen surat masuk dan keluar. Mahasiswa bertugas untuk mencatat, mengarsipkan, dan mendistribusikan dokumen penting, memastikan setiap proses administrasi berjalan lancar. Selain itu, mahasiswa juga berkontribusi dalam menyusun laporan hasil pengawasan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tugas ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan secara sistematis. Mahasiswa turut melakukan pendataan dan rekapitulasi laporan dari tingkat desa. Kegiatan ini mencakup pengolahan data hasil pengawasan dari pengawas desa untuk memastikan akurasi dan ketepatan informasi yang dikirimkan ke Panwascam. Dalam aspek pengawasan Pemilu, mahasiswa mengikuti tahapan pengawasan verifikasi data pemilih. Mereka mendampingi proses pemeriksaan keabsahan data pemilih untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam

penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan dalam pengawasan kampanye dan kegiatan politik di lapangan, mendampingi pengawas untuk memantau dan mencatat potensi pelanggaran yang terjadi. Pada hari pemungutan suara, mahasiswa membantu kegiatan monitoring untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan ini meliputi pemantauan tempat pemungutan suara (TPS), interaksi dengan petugas, dan pelaporan kejadian langsung kepada Panwascam. Mahasiswa juga berperan aktif dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Mereka berpartisipasi dalam penyampaian informasi terkait fungsi Panwascam, pentingnya pengawasan Pemilu, dan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, mahasiswa ikut serta dalam kegiatan edukasi yang mendorong Pemilu yang bebas dari pelanggaran dan berjalan secara demokratis. Melalui kegiatan PKL ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam tentang prosedur dan tantangan dalam pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan. Pengalaman ini membantu mereka mengenali kompleksitas tugas Panwascam dan pentingnya menjaga integritas demokrasi. Selain itu, kemampuan komunikasi, kerja sama, dan analisis mahasiswa berkembang secara signifikan selama pelaksanaan PKL. Berinteraksi dengan berbagai pihak, baik di lingkungan Panwascam maupun masyarakat, melatih keterampilan interpersonal mereka. Mahasiswa juga memberikan kontribusi nyata bagi Panwascam dengan membantu pengelolaan administrasi dan pengawasan. Bantuan ini memastikan tugas lembaga berjalan lebih efisien, terutama dalam menangani volume pekerjaan selama tahapan Pilkada. Secara keseluruhan, PKL di Panwascam Ponggok tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa, tetapi juga mendukung kelancaran tugas Panwascam sebagai lembaga pengawas Pemilu.

Kata Kunci : Panwascam, Praktik Kerja Lapangan, Sejarah Singkat, Tugas Pokok, Fungsi.

HALAMAN PERUNTUKAN

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan laporan praktik kerja lapang ini, sebagai salah satu syarat untuk mennyusun karya ilmiah II (Skripsi). Walaupun masih jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya laporan praktik kerja lapangan ini bisa selesai diwaktu yang tepat, sebagai ucapan terimakasih laporan praktik kerja lapangan ini saya persembahkan kepada ;

1. Allah SWT, yang tiada henti memberikan karunia dan kesehatan hingga saya bisa menyelesaikan hasil laporan ini dengan maksimal.
2. Terimakasih saya ucapkan kepada diri sendiri yang selalu berusaha dan menyempatkan waktu di saat sepulang kerja untuk menyelesaikan laporan ini, banyak hal yang saya pelajari dari hal ini terutama dalam mengatur waktu.
3. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar saya terutama Ayah dan Ibu yang tiada henti mendoakan dan memberikan dukungan penuh kepada anaknya.
4. Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Kabin Feri, S.H. selaku Pembimbing Lapangan yang senantiasa selalu memberikan motivasi, arahan dan pengalaman, juga telah menyempatkan waktunya untuk membimbing saya dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan hingga laporan ini selesai.
5. Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak Panwascam Ponggok yang telah menerima saya untuk melakukan PKL dan penelitian.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman saya yang bersedia membantu saat saya dalam keadaan kesulitan.

RIWAYAT HIDUP

Tri Dina Erlani adalah nama penulis dari laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Lahir di Blitar pada tanggal 16 Desember 2000. Merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, anak kandung dari pasangan Alm. Bapak Jemari dan Ibu Marpu'ah yang juga tinggal sama-sama di Blitar.

Berikut Riwayat Pendidikan Penulis :

Penulis pertama kali mengenyam Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Jatilengger 02 pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2013. Lulus Sekolah Dasar, masih dengan tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 03 Ponggok dan tamat pada tahun 2016.

Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 03 Blitar jurusan Tata Busana pada tahun 2016 hingga 2019.

Penulis belum bisa melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi dikarenakan keterbatasan biaya dan diharuskan bekerja selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang, kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Balitar Blitar di Fakultas Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan ke-Hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Sekretariat Panwascam Ponggok.

Dalam menyusun laporan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Soebiantoro, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
2. Bapak Weppy Susetyo, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
3. Bapak Taufan Perdana S.H.,M.H, selaku ketua program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar
4. Bapak Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL)
5. Bapak Moh. Azhari, M.H., selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam)
6. Bapak Kabin Feri, S.H., selaku Pembimbing Lapang yang telah bersedia memberikan bimbingan serta ilmunya dalam Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.
7. Seluruh staf Panwascam Ponggok yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan dan selesainya laporan Praktek Kerja Lapangan

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan serta cara penulisan laporan, sekiranya saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga bermanfaat bagi para penyusun pada khususnya.

Blitar, 02 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PKL	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RINGKASAN	vii
HALAMAN PERUNTUKAN	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan.....	4
1.4. Manfaat.....	5
BAB II PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)	6
2.1. Tempat dan Waktu	6
2.2. Kegiatan PKL	8
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	33
1.1. Kesimpulan.....	33
1.2. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	35

LAMPIRAN.....	36
---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jadwal Kegiatan	6
Tabel 2. 2 Jadwal Kegiatan	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Sekretariat Panwascam Ponggok	9
Gambar 2 2 Rapat Koordinasi Bersama PKD.....	9
Gambar 2 3 Kegiatan Pelantikan PTPS	10
Gambar 2 4 Bimbingan Teknis PTPS dalam Pengawasan Putungsura	12
Gambar 2 5 Menghadiri Acara Pelantikan KPPS di Desa Bendo.....	13
Gambar 2 6 Menginput Form A Pengawasan Panwascam dan PKD di web rumah data	13
Gambar 2 7 Foto bersama Bawaslu Kabupaten Blitar	15
Gambar 2 8 Foto Rapat Internal bersama Panwascam dan Staf Panwascam Ponggok	18
Gambar 2 9 Monitoring Persiapan Putungsura di desa Langon dan Ringinanyar	19
Gambar 2 10 Kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar di Pecel Sengon, Bendo Ponggok	21
Gambar 2 11 Kegiatan Sosialisasi bersama KPU	23
Gambar 2 12 Kegiatan Apel Pencopotan APK dan Bimbingan Teknis Bersama PTPS.....	25
Gambar 2 13 Kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar ...	26
Gambar 2 14 Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.....	29
Gambar 2 15 Kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar ...	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Presensi Harian	36
---	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka dalam pemerintahan, baik ditingkat nasional maupun daerah. Agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, dibutuhkan lembaga pengawas yang mampu memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu lembaga yang bertugas mengawasi jalannya Pemilu ditingkat kecamatan (Panwascam). Panwascam memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, Panwascam juga bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas Pemilu dan mengawasi setiap potensi pelanggaran. Dengan peran strategis, Panwascam membutuhkan dukungan administrasi dan teknis yang optimal agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi program yang relevan. PKL adalah kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada mahasiswa agar mereka dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia kerja nyata. Pelaksanaan PKL di Panwascam Ponggok memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam mendukung tugas pengawasan Pemilu ditingkat kecamatan. Pelaksanaan PKL di Panwascam Ponggok bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa pada mekanisme kerja lembaga pengawas Pemilu sekaligus melatih mereka dalam berbagai aspek profesionalitas, seperti manajemen administrasi, pengawasan kegiatan lapangan, serta komunikasi dengan berbagai pihak. Selain itu, kegiatan PKL ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada Panwascam dalam

menangani berbagai tugas administrasi dan operasional, terutama selama tahapan krusial dalam Pemilu.

Pemilihan lokasi PKL di Panwascam Ponggok, yang terletak di Kabupaten Blitar, memiliki dinamika tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu, baik dari segi jumlah pemilih maupun aktivitas politik di wilayah tersebut. Hal ini memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa untuk memahami tantangan dan solusi dalam pengawasan Pemilu ditingkat lokal. Selama menjalani PKL di Panwascam Ponggok, mahasiswa diberikan berbagai tugas, diantaranya membantu mengelola dokumen surat masuk dan keluar, menyusun laporan hasil pengawasan kegiatan Pilkada, melakukan pendataan dan rekapitulasi laporan dari tingkat desa, serta mengikuti tahapan pengawasan verifikasi data pemilih. Mahasiswa juga dilibatkan dalam kegiatan pengawasan kampanye, pendampingan pengawasan dilapangan, serta monitoring pada hari pemungutan suara untuk memastikan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, mahasiswa turut berperan dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi Panwascam dan pentingnya pengawasan Pemilu yang demokratis. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman praktis, tetapi juga mampu mengembangkan berbagai ketrampilan, seperti kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan pengelolaan waktu. Mahasiswa juga mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya pengawasan Pemilu dalam menjaga integritas demokrasi. Kontribusi mereka dalam mendukung tugas Panwascam juga membantu lembaga ini dalam menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efisien. Program PKL di Panwascam Ponggok memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi mahasiswa, program ini menjadi sarana belajar yang berharga untuk mengenal dunia kerja nyata dan mengembangkan kompetensi profesional. Sementara itu, bagi Panwascam, kehadiran mahasiswa PKL memberikan dukungan tambahan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan administrasi, terutama pada saat-saat penting menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam memahami dinamika dunia kerja. Sebagai bagian dari tugas lembaga pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi melalui pengawasan setiap tahapan pemilu. Panwascam bertugas memastikan pelaksanaan Pemilu di tingkat kecamatan berjalan secara transparan, jujur, dan adil. Melalui PKL di Sekretariat Panawascam Ponggok, mahasiswa memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan, seperti pengelolaan administrasi, pengawasan tahapan Pemilu, serta edukasi kepada masyarakat. Keterlibatan ini memberikan wawasan praktis mengenai prosedur kerja Panwascam dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pengawasan. Mengenai pentingnya menjaga integritas Pemilu dan mengawasi setiap potensi pelanggaran. Dalam struktur Panwascam, Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas pengawasan ini. Divisi HPPH bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses Pemilu berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Tugas pokok Divisi HPPH mencakup pengkajian dan analisis terhadap Pelanggaran Pemilu, penyusunan rekomendasi atas kasus yang ditemukan, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama pelaksanaan Pemilu. Selain itu, Divisi HPPH juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan pelanggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Progam PKL ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan profesional mahasiswa, seperti komunikasi, manajemen data, dan kerjasama tim, sehingga dapat mendukung kesiapan mereka memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan PKL, sekaligus memberikan gambaran tentang kontribusi mahasiswa dalam mendukung tugas dan fungsi Panwascam Ponggok. Laporan ini disusun berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang

dilakukan di Panwascam Ponggok, untuk menganalisis problematika yang dihadapi oleh Panwascam dalam pengawasan Pilkada tahun 2024. Studi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul selama proses pengawasan, baik dari segi sumber daya, koordinasi antar lembaga, maupun potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Panwascam dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pengawasan di Pilkada mendatang. Dengan menganalisis kasus di Panwascam Ponggok, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Pilkada ditingkat kecamatan, serta memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan bebas dari praktik kecurangan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu ditingkat kecamatan, khususnya di wilayah Ponggok?
2. Bagaimana Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) berperan dalam menjaga integritas Pemilu di Panwascam Ponggok, dan bagaimana peran mahasiswa PKL dalam mendukung tugas tersebut?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu ditingkat kecamatan, khususnya di wilayah Ponggok?

2. Untuk mengetahui bagaimana Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) berperan dalam menjaga integritas Pemilu di Panwascam Ponggok, dan bagaimana peran mahasiswa PKL dalam mendukung tugas tersebut?

1.4. Manfaat

Penelitian ini dilaksanakan dengan Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta referensi dibidang hukum perdata khususnya tentang mekanisme kerja lembaga pengawas Pemilu, termasuk strategi pengawasan dan edukasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi maupun pengetahuan kepada berbagai pihak mengenai pentingnya mengembangkan ketrampilan profesional, seperti komunikasi, manajemen data, pengelolaan waktu, dan kerjasama tim.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

2.1.Tempat dan Waktu

A. Tempat Praktek Kerja Lapangan

Berikut ini merupakan informasi data Kantor tempat pelaksanaan PKL :

1. Nama Lembaga : Panwascam Ponggok
2. Alamat : Jl. Argo Pegat RT 02 RW 02, Dusun Ponggok,
Kec. Ponggok, Kab. Blitar
3. Telepon : 0857 – 2124 - 1565
4. Email : ponggok.panwaslucamblitar@gmail.com

B. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Berikut jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan :

Tabel 2. 1 Jadwal Kegiatan

No.	Nama Kegiatan	Waktu
1.	Pelantikan PTPS, Bimbingan Teknis PTPS Se Kecamatan Ponggok	04 – 05 November 2024
2.	Menyusun Form A Pengawasan Untuk Kegiatan Pelantikan KPPS, Monitoring Pelantikan KPPS Di Desa Jatilengger dan Desa Bendo, Input Rumah Data	06 – 08 November 2024
3.	Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar	09 – 10 November 2024
4.	Menyusun Imbauan Kode Etik Penyelenggara – Persiapan Putungsur	11 – 18 November 2024
5.	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar,	19 - 20 November 2024

No.	Nama Kegiatan	Waktu
	Rapat Koordinasi Panwascam Bersama Panwaslu Desa/Kelurahan Se Kecamatan Ponggok	
6.	Menghadiri Acara Sosialisasi Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil, Bimbingan Teknis Bersama PTPS Se Kecamatan Ponggok, & Pelaksanaan Apel Pencopotan APK Bersama Panwascam, PPK, PPS, PKD.	21 – 23 Desember 2024
7.	Bimbingan Teknis Web Siwaslih dan Rumah Data, Ledang PPK	24 – 26 November 2024
8.	Menginput Hasil Penghitungan Suara Tingkat Desa di Siwaskat Kabupaten Blitar	27 November 2024
9.	Menghadiri Rapat Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Tahun 2024 di Puri Perdana Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar	28 – 29 November 2024
10.	Menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Ponggok di Aula Kecamatan Ponggok	30 November 2024
11.	Rekap AKP Logistik Surat Suara Kecamatan Ponggok, Rekap Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan Ponggok	01 – 02 Desember 2024
12.	Menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan	03 – 04 Desember 2024

No.	Nama Kegiatan	Waktu
	Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar, Rekap C-Plano dan C-Salinan Se Kecamatan Ponggok	

2.2.Kegiatan PKL

Adapun bidang kerja yang dilakukan oleh praktikan , antara lain :

Tabel 2. 2 Jadwal Kegiatan

Hari/Tanggal	Senin, 04 November 2024
Kegiatan	Berdiskusi untuk kegiatan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan melakukan rapat koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan pelantikan PTPS se kecamatan ponggok
Penjelasan	1. Kordiv SDM-O Bapak Moh. Azhari, M.H. Selaku Panwas Kecamatan Ponggok memberikan materi tentang persiapan pelantikan PTPS, dalam sesi ini, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDM-O) Panitia Pengawas Kecamatan Ponggok memberikan pemaparan materi terkait persiapan pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Materi yang akan disampaikan cukup beberapa aspek yaitu, Rincian jadwal Pelantikan, Tata Cara Pelaksanaan, dan Persiapan Teknis. 2. Tercapainya kesepahaman antara semua pihak terkait pelaksanaan pelantikan PTPS. Dari hasil diskusi dan rapat koordinasi ini adalah adanya kesepahaman bersama antara berbagai pihak yang terlibat. Hal ini meliputi Panwas Kecamatan, tim teknis, dan peserta pelantikan. Kesepahaman ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pandangan yang sama mengenai proses dan

	tujuan pelantikan, sehingga potensi hambatan atau kesalahpahaman dapat diminimalisasi. 3. Evaluasi dokumen yang diperlukan untuk pelantikan, seperti undangan, daftar hadir, dan agenda acara. Kegiatan diskusi dan rapat koordinasi ini sangat penting untuk kelancaran pelantikan PTPS di Kecamatan Ponggok. Dengan adanya koordinasi yang baik, peserta PKL mendapatkan pengalaman nyata dalam mengelola kegiatan formal serta berperan aktif dalam proses persiapan pelantikan.
Dokumentasi	 <i>Gambar 2 1 Sekretariat Panwascam Ponggok</i>  <i>Gambar 2 2 Rapat Koordinasi Bersama PKD</i>



Gambar 2 3 Kegiatan Pelantikan PTPS

Hari/Tanggal	Selasa,05 November 2024
Kegiatan	Bimbingan Teknis PTPS bersama PKD
Penjelasan	Pengawas TPS Bersama Panwaslu Kelurahan/Desa Dapat Mengetahui Tupoksinya Sehingga Proses Pengawasan Dapat Berjalan Lancar Dan Efisien. Dari Hasil Bimbingan Teknis Didapatkan Kesimpulan Bahwasanya Pengawas TPS Dapat Melakukan Koordinasi Dengan Pengawas Kelurahan/Desa. Panwascam Ponggok divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) bapak Saiful Arifin, S.T. memberikan pemaparan terkait kesiapan TPS, kelengkapan KPPS, Kepatuhan Waktu, Kepatuhan Proses saat Pemungutan suara, Penghitungan Suara, dan Pembuatan Form A. Form A adalah formulir resmi yang digunakan oleh pengawas untuk mencatat temuan pelanggaran atau potensi pelanggaran

	yang terjadi selama proses pilkada. Dalam bimbingan teknis, dilakukan simulasi pengisian form A berdasarkan skenario kasus nyata yang mungkin terjadi di TPS. Panwascam Pongkok juga mengimbau kepada PTPS agar selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa, beberapa bentuk koordinasi yang dapat dilakukan oleh PTPS adalah sebagai berikut : • Melaporkan kendala teknis atau administratif yang dihadapi oleh Pengawas TPS ke Panwaslu Kelurahan/Desa • Mendapatkan arahan atau klarifikasi dari panwaslu kelurahan/desa terkait prosedur tertentu • Berkomunikasi secara intensif sebelum, selama, dan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara Bimbingan teknis yang dilakukan oleh Panwascam Pongkok memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapan pengawas TPS. Melalui kegiatan bimtek ini panwascam pongkok berharap kepada pengawas TPS memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, terbangun koordinasi yang efektif antara pengawas TPS dan panwaslu kelurahan/desa, Proses pemilu, mulai dari pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pelaporan pelanggaran, berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan peraturan yang berlaku.
--	---

Dokumentasi	 <i>Gambar 2 4 Bimbingan Teknis PTPS dalam Pengawasan Putungsura</i>
Hari/Tanggal	Rabu s/d Jum'at, 06 – 08 November 2024
Kegiatan	Menginput Form A panwascam dan PKD ke web Rumah data, Menghadiri acara Pelantikan KPPS
Penjelasan	Pada hari ini, dilaksanakan proses penginputan Form A dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) ke dalam web Rumah Data dilakukan sebagai bagian dari upaya pendokumentasian hasil pengawasan secara sistematis dan terintegrasi. Form A berisi laporan pengawasan, temuan, serta catatan kejadian khusus selama tahapan pilkada di wilayah kecamatan ponggok. Input data ini bertujuan untuk memastikan semua informasi terkait pengawasan terekam dengan baik, transparan, dan dapat diakses sebagai bahan evaluasi maupun pertanggungjawaban. Diharapkan seluruh laporan dapat diunggah tepat waktu agar tidak ada data yang tertinggal. Selanjutnya saya menghadiri acara pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertempat di wilayah kecamatan ponggok. Pelantikan ini menandai kesiapan para anggota KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam acara tersebut, para anggota KPPS dilantik dan diambil sumpah/janjinya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan profesional, jujur,

	dan penuh integritas. Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memastikan keberlangsungan pemilihan 2024 berjalan sesuai prinsip demokrasi, berintegritas, dan akuntabel.
Dokumentasi	 <i>Gambar 2 5 Menghadiri Acara Pelantikan KPPS di Desa Bendo.</i>  <i>Gambar 2 6 Menginput Form A Pengawasan Panwascam dan PKD di web rumah data</i>
Hari/Tanggal	Sabtu, 09 - 10 November 2024
Kegiatan	Panwascam Ponggok Kodiv HPPH beserta staf HPPH Tri Dina Erlani Menghadiri Rapat Koordinasi Identifikasi Potensi TPS Rawan dan Persiapan Pengawasan Tungsura bersama Bawaslu Kabupaten Blitar
Penjelasan	Bawaslu kabupaten blitar memaparkan mengenai identifikasi TPS rawan merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk mendeteksi tempat-tempat pemungutan suara yang berpotensi mengalami gangguan, pelanggaran, atau kendala selama proses pemilu. Tujuan utama identifikasi ini adalah untuk memitigasi risiko dan memastikan proses pemilu berlangsung secara lancar,

	jujur, dan adil. Beberapa indikator TPS rawan untuk mengidentifikasi antara lain : • Kerawanan TPS yang sulit dijangkau atau berada di daerah terpencil • Keterbatasan infrastruktur seperti jaringan listrik atau koneksi internet, yang dapat memengaruhi kelancaran proses penghitungan suara • Kerawanan sosial, adanya potensi konflik sosial atau politik di wilayah tersebut • Sejarah keributan pada pemilu sebelumnya • Tingkat partisipasi pemilih yang rendah karena faktor politik uang • Kerawanan Administrasi, pemilih ganda atau daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah, seperti pemilih yang tidak sesuai dengan domisili • Tidak sesuaian antara jumlah surat suara yang didistribusikan dengan jumlah pemilih yang terdaftar • Kerawanan Politik, adanya upaya mobilisasi pemilih untuk memilih kandidat tertentu melalui politik uang • Intervensi oleh pihak luar yang mempengaruhi netralitas petugas TPS atau Pengawas Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Blitar Bapak Jaka Wandira memaparkan terkait persiapan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura), persiapan pengawasan untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara yaitu dengan Pemetaan Tugas pengawasan, Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap pengawas TPS, simulasi penanganan pelanggaran. Identifikasi TPS rawan dan persiapan pengawasan tungsura menjadi langkah krusial dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, transparan, dan aman. Melalui identifikasi dini,
--	--

	pelatihan bimtek, serta koordinasi yang baik antar jajaran pengawas, potensi hambatan dapat diminalkan sehingga pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar.
Dokumentasi	 <i>Gambar 2 7 Foto bersama Bawaslu Kabupaten Blitar</i>
Hari/Tanggal	Senin s/d Senin, 11 - 18 November 2024
Kegiatan	Menyusun Imbauan Kode Etik Penyelenggara – Persiapan Putungsura
Penjelasan	Sebagai penyelenggara pemilu, seluruh pihak yang terlibat, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Untuk itu, kepatuhan terhadap kode etik penyelenggara pemilu menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. menyusun imbauan kode etik penyelenggara yang isinya sebagai berikut : 1. Dasar Hukum: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; e. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; f. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan; g. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta wali kota dan Wakil Wali kota; h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan
--	---

	Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; 2. Mengingat; a. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017; b. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 Nomor (3) bahwa: Sumpah/Janji Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN Sebagai Berikut: “Demi Allah (Tuhan), Saya Bersumpah/Berjanji: Bahwa Saya Akan Memenuhi Tugas Dan Kewajiban Saya Sebagai Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN Dengan Sebaik-Baiknya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Berpedoman Pada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Saya Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenang Akan Bekerja Dengan Sungguh-Sungguh, Jujur, Adil, Dan Cermat Demi Suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden/Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Tegaknya Demokrasi Dan Keadilan, Serta Mengutamakan Kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia Daripada Kepentingan Pribadi Atau Golongan”.
--	---

	3. Mengimbau Bahwa Berdasarkan Ketentuan di atas, Panwaslu Kecamatan Ponggok Mengimbau Kepada Seluruh Penyelenggara, PPK, PPS, dan KPPS Se-Kecamatan Ponggok Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Agar; a) Memastikan untuk memperhatikan kode etik penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan pilkada; b) Mengintruksikan PPS untuk menginformasikan kepada KPPS untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya, demi kelancaran proses pemilu yang fair dan transparan; c) Mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU, Bawaslu, atau lembaga terkait; d) Menghindari segala bentuk konflik kepentingan, baik itu kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak manapun yang dapat merusak proses demokrasi
Dokumentasi	 <i>Gambar 2 8 Foto Rapat Internal bersama Panwascam dan Staf Panwascam Ponggok</i>

	 <i>Gambar 2 9 Monitoring Persiapan Putungsura di desa Langon dan Ringinanyar</i>
Hari/Tanggal	Selasa s/d Rabu, 19 – 20 November 2024
Kegiatan	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar, Rapat Koordinasi Panwascam Bersama Panwaslu Desa/Kelurahan Se Kecamatan Ponggok
Penjelasan	Rapat Koordinasi ini dilaksanakan untuk memastikan kelancaran dan akurasi dalam pengawasan pemungutan serta penghitungan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Bapak Jaka Wandira menyampaikan beberapa hal terkait proses pengawasan ini. Pembahasan utama dalam rakor ini adalah Penyelesaian Siwaskat tepat waktu. Semua

	laporan harus selesai dan diinput secara lengkap pada pukul 17.00 pada hari penghitungan suara ditingkat desa. Penginputan juga wajib menggunakan laptop untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan atau rumus di aplikasi. Oleh karena itu, seluruh panwaslu kelurahan/Desa (PKD) diminta untuk mencatat siapa saja di timnya yang memiliki laptop agar pengerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Kemudian setelah pelaksanaan TOT, panwaslu kecamatan diwajibkan segera mengadakan pleno pembagian tugas untuk memastikan setiap anggota pengawas memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai wilayah kerjanya. Pemanfaatan aplikasi siwaslih menjadi alat utama dalam pengawasan dan pelaporan tahapan pilkada. PKD bertugas membantu penginputan data melalui admin kecamatan untuk memastikan laporan segera diproses.
Dokumentasi	



Gambar 2 10 Kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar di Pecel Sengon, Bendo Ponggok

Hari/Tanggal	Kamis s/d Sabtu, 21 – 23 November 2024
Kegiatan	Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Bersama KPU, Bimbingan Teknis PTPS tentang Pengawasan Pemungutan & Penghitungan Suara, Bimbingan Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan dan Formulir Model A serta Pelaporan bagi Pengawas TPS di desa Bendo dan Ponggok.
Penjelasan	1. Dalam rangka menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024, KPU mengadakan sosialisasi untuk memahami tahapan-tahapan penting dalam proses pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi hasil, dan penetapan hasil pemilihan. Beberapa informasi yang disampaikan oleh KPU kabupaten blitar yang perlu diketahui : 2. Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) a. Tahapan Pemungutan Suara, tahapan pemungutan suara dimulai dengan penyampaian C-KWK yang paling lambat dilaksanakan pada H-3 hari sebelum hari H. Jika pada hari H pemilih belum menerima undangan, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP elektronik atau memeriksa nama di DPT.

	b. Pelaksanaan Pemungutan suara, pelaksanaan ini yang akan dihadiri oleh : saksi dari paslon, pengawas TPS, Pemantau terdaftar, serta Masyarakat umum yang berhak mengikuti proses tersebut. Pemungutan suara juga dapat diliput oleh pewarta yang telah menunjukkan surat tugas c. Saksi Pemilu, setiap pasangan calon dapat mengirimkan maksimal 2 saksi didalam ruang pemungutan suara, dengan pergantian saksi yang diatur. Saksi harus menyerahkan surat mandat yang sudah ditandatangani oleh pasangan calon. Apabila saksi terlambat, kejadian ini akan dicatat dalam C-kejadian khusus dengan membawa surat mandat d. Jenis pemilih yang berhak memilih pada pemilihan ini, antara lain : Pemilik ktp elektronik yang terdaftar dalam DPT, pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT pindahan, Pemilih DPK yang berdomisili di wilayah TPS tersebut. 3. Kemudian pada Bimbingan teknis alat kerja pengawasan dan formulir Model A, diperuntukan bagi PTPS untuk memahami dengan baik cara mengisi formulir yang digunakan dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Setiap pengawasn TPS diingatkan untuk selalu melaporkan setiap temuan atau permasalahan yang terjadi selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat akan sangat mendukung keberhasilan pengawasan serta menghindari potensi kecurangan dalam proses pemilu.
--	---

Dokumentasi	 <i>Gambar 2 11 Kegiatan Sosialisasi bersama KPU</i>
Hari/Tanggal	Minggu s/d Rabu, 24 – 27 November 2024
Kegiatan	Pelepasan Apk, Bimbingan Teknis Web Siwaslih dan Rumah Data, Menginput Hasil Penghitungan Suara Tingkat Desa di Siwaskat Kabupaten Blitar
Penjelasan	1. Dalam tahapan-tahapan Kampanye penempelan APK, banyaknya poin-poin yang menjadi pencermatan, penyikapan dalam pengawasan serta pelaporan, yaitu : - Melaksanakan pencopotan APK - Berkoordinasi dengan PKD se Kecamatan Ponggok dalam pengawasan masa kampanye - Berkoordinasi dan Memberikan Imbauan maupun saran Perbaikan kepada Team Kampanye Paslon

	d. Menentukan persiapan pelepasan APK 2. Poin-Poin Bimtek PTPS antara lain : a. Tugas dan Fungsi PTPS b. PTPS harus mampu bersosialisasi dengan KPPS c. Persiapan Pemungutan Suara d. Denah Pemungutan Suara e. Tata Cara Pemilih memberikan Suara f. Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS g. Dalam kegiatan Bimtek membahas studi kasus pelanggaran pada tahapan putungsura 3. Apel Pencopotan Apk bersama dengan PPK, PPS, dan PKD, apel inti menandakan bahwa semua APK yang terpasang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan harus segera dicopot sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pencopotan APK dilakukan dengan koordinasi yang baik antara semua pihak untuk memastikan pilkada berjalan dengan adil dan tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mensukseskan pilkada 2024, dengan memastikan setiap tahapan pilkada berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai prosedur.
Dokumentasi	



Gambar 2 12 Kegiatan Apel Pencopotan APK dan Bimbingan Teknis Bersama PTPS

Hari/Tanggal	Kamis s/d Jum'at, 28 – 29 November 2024
Kegiatan	Menghadiri Rapat Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Tahun 2024 di Puri Perdana Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar
Penjelasan	Dalam Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara hal yang perlu diperhatikan yaitu : 1. Kerawanan-kerawanan dalam tahap Pemungutan, Penghitungan Surat Suara, dalam hal ini Panwascam harus lebih maksimal dalam melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara karena sangat rawan terjadinya kecurangan dari awal dimulainya pemungutan suara sampai dengan penghitungan dan rekapitulasi surat suara, pengawas desa dibantu oleh PTPS harus dengan teliti dalam mengawasi setiap orang yang masuk kedalam Bilik suara serta memastikan orang tersebut menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Dengan menjalankan aturan yang sudah tercantum dalam PKPU dan Perbawaslu. 2. Perencanaan Pengawasan, pada perencanaan pengawasan panwaslu kecamatan Ponggok menyusun perencanaan pengawasan yang dimulai dari, membimtek kepada pengawas mulai dari pengawas tingkat desa sampai dengan Pengawas

	TPS dengan beberapa materi seperti pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Dokumentasi	  <i>Gambar 2 13 Kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar</i>
Hari/Tanggal	Sabtu, 30 November 2024
Kegiatan	Menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pongkok di Aula Kecamatan Pongkok
Penjelasan	Pada hari Sabtu, 30 November Ketua Panwascam Pongkok beserta Anggota dan Staf Panwaslu Kecamatan Pongkok telah melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Blitar Acara ini dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pengawas Pemilu, saksi dari peserta pemilu, serta pihak-pihak terkait

	lainnya. Dalam rapat pleno terbuka ini, dilakukan pembacaan dan verifikasi hasil perolehan suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayah Kecamatan Ponggok. Proses rekapitulasi berjalan secara transparan dan akuntabel, dimana seluruh pihak dapat menyaksikan dan memberikan masukan terkait hasil yang disampaikan. Selama kegiatan berlangsung, suasana tetap kondusif dan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Rapat Pleno Terbuka ini dilaksanakan di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang berlokasi di Aula Kecamatan Ponggok pada pukul 09.25 WIB sampai dengan pukul 21.50 WIB Pengawasan tersebut, saya lakukan dengan cara memastikan: - PPK melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK; - PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan; - PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi; - Surat undangan paling sedikit memuat: hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi; tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi; PPK menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai; - PPK melakukan penyiapan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dimulai; dan - Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf f terdiri atas:
--	--

	1) ruang rapat, dengan mempertimbangkan: a. kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan b. penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel 2) alat bantu rekapitulasi; 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 4) kotak rekapitulasi yang digunakan untuk menampung dan menyimpan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan; 5) kotak hasil TPS yang digunakan untuk menyimpan seluruh formulir hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di wilayah kerja PPK untuk setiap jenis Pemilihan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai; dan sarana lainnya, yang terdiri atas; sampul kertas; segel; spidol; bolpoin; lem perekat; alat tulis kantor lainnya; gembok atau alat pengaman lainnya; dan komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik. Pengawasan tersebut kami lakukan dengan tujuan agar Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	--

Dokumentasi



Gambar 2 14 Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Hari/Tanggal	Minggu s/d Senin, 01 – 02 Desember 2024
Kegiatan	Rekap AKP Logistik Surat Suara Kecamatan Ponggok, Rekap Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan Ponggok
Penjelasan	Pada hari ini, melakukan kegiatan Rekapitulasi AKP logistik Surat Suara serta Rekap Form A pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Ponggok. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan untuk memastikan seluruh proses pemilu berjalan dengan transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh data terkait logistik surat suara dan hasil pengawasan dapat dikompilasi dengan baik, lengkap, dan akurat. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjaga integritas proses pilkada, khususnya dikecamatan ponggok, sebelum dilanjutkan ke tahapan rekapitulasi ditingkat kabupaten.
Hari/Tanggal	Selasa s/d Rabu, 03 – 04 Desember 2024
Kegiatan	Menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar, Rekap C-Plano dan C-Salinan Se Kecamatan Ponggok
Penjelasan	Dalam rangka memastikan kelancaran pengawasan dan rekapitulasi hasil pemilihan 2024, beberapa poin penting disampaikan dan perlu ditinjakanjuti oleh seluruh jajaran pengawas. Adapun poin-poin tersebut adalah sebagai berikut : 1. Penggunaan D hasil kecamatan akan menjadu acuan utama dalam proses rekapitulasi ditingkat kabupaten. Oleh karena itu, keakuratan data ini harus dijaga dan dikawal dengan baik 2. Pengecekan kesesuaian data di siwaskat perlu dicermati kembali, khususnya terkait kecocokan dengan D Hasil kecamatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada

	perbedaan data antara sistem dan hasil pengawasan dilapangan. 3. Diharapkan kepada semua pihak yang belum mengisi data agar segera menyelesaikannya, mengingat kelengkapan data di sistem ini sangat mendesak dan krusial. 4. Rumah data, termasuk Formulir A Kecamatan Rekapitulasi, harus segera di unggah ke dalam sistem. Saat ini masih banyak data yang belum diunggah, sehingga perlu percepatan dalam proses ini untuk melengkapi arsip pengawasan. 5. Dokumentasi hasil pengawasan dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus disusun dengan rapi dalam folder-folder yang sesuai. Proses foldering ini harus dilakukan per TPS agar memudahkan pencarian dan pengelolaan dokumentasi di kemudian hari.
Dokumentasi	



Gambar 2 15 Kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu Kabupaten Blitar

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

1. Pada Sekretariat Panwascam Ponggok ini selalu melibatkan para staf administrasi dalam pekerjaannya seperti membuat imbauan, saran perbaikan, mengupload administrasi yang dibutuhkan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar, berkomunikasi pada pihak-pihak terkait. Sehingga pembelajaran yang telah diperoleh dalam melaksanakan PKL ini penulis dapat mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, mengukur sejauh mana penguasaan ilmu praktik, dan semua yang terkait dalam dunia kerja.

2. Adapun sistem kerja yang dilaksanakan pada Sekretariat Panwascam Ponggok sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara runtut sehingga mempermudah staf dalam menyelesaikan tugasnya agar tidak mengalami kebingungan. Namun ada beberapa prosedur yang dilakukan secara paralel yang dimaksudkan agar cepat terselesaikannya proses berkas tersebut.

1.2. Saran

Berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan PKL di Sekretariat Panwascam Ponggok, penulis ingin memberikan saran mengenai beberapa upaya pembenahan antara lain adalah :

1. Panwascam Ponggok dan juga staf diharapkan dapat meningkatkan sistem komunikasi, dan dokumentasi kegiatan agar data yang diperlukan lebih mudah diakses oleh tim pengawas maupun pelaksana lapangan.

2. Sebaiknya Panwascam Ponggok mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pengawasan Pilkada.

3. Untuk lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan pengawasan Pilkada guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, Progam

sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya peran pengawasan Pilkada sebaiknya ditingkatkan agar partisipasi masyarakat lebih maksima

4. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja lapangan, mahasiswa yang akan melakukan Praktek Kerja Lapangan diharapkan terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan mengumpulkan informasi-informasi mengenai perusahaan atau instansi yang dituju sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan. Harus teliti dalam melaksanakan tugas yang diberikan serta harus dapat bekerja sama dengan mahasiswa/mahasiswi Praktek Kerja Lapangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahendra, Bagas. *Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Mallarangeng, Andi Bau, Dewi Wahyuni Mustafa, and Ismail Ali. "Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana." *Legal Journal of Law* 2.2 (2023): 119-134.
- Susanto, A., Asy'ari, H., & Hardjanto, U. S. (2016). Analisis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis di Kota Semarang Tahun 2014. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-16.
- Axni, L. S. (2024). *IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (3) PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- NOMENTARI, Y. (2022). *KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 (Studi Kasus Pemilihan Walikota Bandar Lampung)*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Presensi Harian



YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
 Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

Nama : TH. DINA ERLANI
 NIM : 21107710053

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	04 November 2024	1	Pelantikan PTPs, Rapat PKD
2	05 November 2024	2	Bimbingan Teknis PTPs
3	06 November 2024	3	Menyusun form A pengawasan kegiatan pelantikan APPS
4	07/11/2024	4	monitoring pelantikan APPS desa bendo
5	08/11/2024	5	- input rumah data
6	09/11/2024	6	- Rapat koordinasi bersama kawaslu blitar
7	10/11/2024	7	- persiapan pengawasan Tungsura
8	11/11/2024	8	Menyusun imbauan kode etik penyelenggara
9	12/11/2024	9	Mengidentifikasi TPS rawan
10	13/11/2024	10	Input AKP identifikasi TPS rawan
11	14/11/2024	11	"
12	15/11/2024	12	inventaris APK (Alat peraga kampanye), BK (Bahan kampanye)
13	16/11/2024	13	Membuat imbauan masa tenang
14	17/11/2024	14	Membuat imbauan pemungutan & Penghitungan suara
15	18/11/2024	15	Pengawasan AKP DPTB, DPK, Potensial TMS (periode terakhir)
16	19/11/2024	16	Faktor persiapan pengawasan penghitungan suara bersama kawaslu
17	20/11/2024	17	- input AKP siwaskat pilbub/kota, gubernur desa/kelurahan

18	21/11/2024	18		- Sosialisasi bersama KPU - Bimbingan teknis tahap 1
19	22/11/2024	19		- Bimbingan teknis tahap 2
20	23/11/2024	20		- Membuat imbauan pengalihan - Ikn PMU - Apeel pencopotan APK
21	24/11/2024	21		simulasi rumah data
22	25/11/2024	22		- bimbingan teknis web siwaskat 3 rumah data
23	26/11/2024	23		- bintek tahap 2
24	27/11/2024	24		- input siwaskat pilbub & gubernur - patroli pengalihan ke desa
25	28/11/2024	25		- Rapat persiapan pengawasan bersama bawaskab
26	29/11/2024	26		"
27	30/11/2024	27		- Rapat pleno terbuka tingkat kecamatan
28	1/12/2024	28		Rapat Akr logistik kec. Ponggok
29	2/12/2024	29		Rapat formasi pengawasan
30	3/12/2024	30		Rapat pengawasan rekapitulasi bersama bawaskab

4 Desember 2024

Pembimbing Lapangan,

FABIN FERI, S.H.